

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pengawasan

Pengawasan adalah identifikasi berbagai faktor yang menghambat kegiatan, dan pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan agar tujuan dapat tercapai. Hal ini di perlukan untuk memastikan apakah apa yang direncanakan dan diorganisasikan dapat berjalan dengan baik (julina 2008 :72). Pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemn tercapai (usman efendi 2014:205). Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut (Brantas,2009). Kamus besar bahasa indonesia mendefinisikan istilah pengawasan berasal dari kata “awas” yang artinya memperhatikan baik-baik, artinya melihat sesuatu dengan cermat dan seksama. Menurut Winardi, pengawasan adalah semua aktifitas yang dilaksanakan oleh pemimpin dalam upaya memastikan bahwa hasil aktual sesuai dengan hasil yang direncanakan. Sedangkan menurut Prayudi, pengawasan adalah suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperhatikan.

Henry fayol berpendapat bahwa pengawasan adalah ketetapan dalam menguji apa pun sesuatu persetujuan yang disesuaikan dengan instruksi dan prinsip perencanaan. Sedangkan prof Sondang Siagian berpendapat bahwa

Scmerhon menjelaskan pengawasan sebagai proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut (Ernie tismawati sule dan kurniawan saefullah 2005 : 317)

Menurut Earl P. Strong pengawasan adalah *controlling is the proses of regulating the various factors in an enterprise according to the requirement of its plans* (pengawasan adalah proses pengaturan berbagai faktor dalam suatu perusahaan, agar pelaksanaan sesuai dengan ketetapan-ketetapan dalam rencana) sedangkan menurut G.R Terry : *controlling can be defined as the process of determining what is to be accomplished that is the standard ; what is being accomplished, that is the performance, evaluating the performance and if necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is, in conformity with the standard* (pengawasan dapat didefinisikan sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan apabila perlu

melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dengan standar (Brantas 2009:189).

Pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila mengoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula (Manulang 2012: 173).

Dari definisi yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan bahwasanya pengawasan adalah suatu proses pemantauan, penilaian pelaporan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin ataupun organisasi guna untuk mengetahui apakah kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin ataupun organisasi tersebut berjalan semestinya. Dan apabila terjadi kegagalan ataupun penyimpangan-penyimpangan bisa dapat di tangani langsung dan dapat di cari jalan keluarnya.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Dengan pengawasan ini dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan suatu pemimpin dijalankan dan sampai sejauhmana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamat atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan rencana dan peraturan atau suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan, dan dengan adanya pengawasan dapat memperkecil timbulnya hambatan, sedangkan hambatan yang terjadi dapat segera diketahui yang kemudian dapat dilakukan tindakan perbaikannya.

Pengawasan pada dasarnya berfungsi menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi (*corrective actions*) jika terjadi kesalahan atau perbedaan dari tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan. Pengawasan bukan merupakan suatu tujuan, melainkan sarana untuk meningkatkan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan. Didalamnya termasuk unsur pencegahan terhadap penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi. Kegiatan bukan semata-mata mencari siapa yang bersalah, tetapi apa yang salah dan mengapa kesalahan itu terjadi. Sehingga dalam kegiatan pengawasan ada unsur membimbing dan mendidik organisasi untuk meningkatkan kemampuan profesionalismenya (Afifuddin 2012 : 103).

Konsep pengawasan demikian sebenarnya menunjukkan pengawasan merupakan bagian dari fungsi manajemen, dimana pengawasan dianggap sebagai bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih atas kepada pihak dibawahnya. Dari segi manajerial pengawasan mengandung makna pula sebagai pengamatan atas pelaksanaan seluruh kegiatan unit organisasi yang diperiksa untuk menjamin agar seluruh pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana dan peraturan suatu usaha agar suatu pekerjaan dapat dilaksanakan dengan rencana yang ditentukan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Proses pengawasan adalah proses yang menentukan tentang apa yang harus dikerjakan, agar apa yang diselenggarakan sejalan dengan rencana. Artinya pengawasan itu terdiri atas beberapa aktifitas, agar segala sesuatu yang menjadi tugas dan tanggung jawab terselenggarakan. Proses pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Proses pengawasan dilihat dari waktu pelaksanaannya dapat dibedakan menjadi tiga bagian penting, yaitu : pengawasan preventif dilakukan sebelum sebuah rencana dijalankan, hal ini dimaksudkan untuk mencegah sedini mungkin agar tidak terjadi penyimpangan. pengawasan Preventif berlangsung selama proses implementasi rencana rencana, hal ini bertujuan agar jika terjadi penyimpangan maka tindakan perbaikan dapat segera di jalankan. dan pengawasan respresif dilakukan setelah proses berakhir dan ada hasil yang dicapai, hal ini dimaksudkan untuk menilai dan mengukur sejauh mana hasil akhir memiliki kesesuaian dengan rencana (Tjutju Yuniarsih,2013:93).

Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya bahwasanya setiap orang dilarang untuk menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dan mati dan juga memperniagakannya , menyimpan atau memiliki kulit, tubuh, atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari kegiatan-kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan. Fungsi-fungsi manajemen inilah yang harus dimiliki oleh setiap lembaga organisasi untuk merealisasikan program kerjanya dan memperbaiki kinerja organisasi. Fungsi-fungsi manajemen ini juga sangat membantu bagi setiap organisasi dalam pencapaian tujuannya secara efektif dan efisien.

Pengawasan yang efektif didasarkan pada sistem informasi manajemen yang efektif. Sistem informasi manajemen dapat ditetapkan sebagai metode formal untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh manajer agar dapat melaksanakan tugas secara efektif. Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua tingkat manajer dari tingkat atas sampai bawah, dan kelompok-kelompok kerja (Hasnun Jauhari Ritonga 2015:80).

Cara-cara pengawasan ini dilakukan sebagai berikut (Brantas 2009:195) :

1. *Pengawasan langsung* adalah pengawasan yang dilakukan sendiri secara langsung oleh seorang manajer atau pimpinan. Manajer atau pemimpin memeriksa pekerjaan yang sedang dilakukan untuk mengetahui apakah dikerjakan dengan benar dan hasil-hasilnya sesuai dengan yang dikehendaknya. Pengawasan langsung ini dapat dilakukan dengan cara inspeksi langsung, observasi ditempat dan laporan ditempat.
2. *Pengawasan tidak langsung* adalah pengawasan jarak jauh, artinya dengan melalui laporan yang diberikan oleh bawahan. laporan ini dapat berupa lisan atau tulisan tentang pelaksanaan dan hasil-hasil yang dicapai.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. *Pengawasan berdasarkan pengecualian* adalah pengawasan yang dikhususkan untuk kesalahan-kesalahan yang luar biasa dari hasil atau standar yang diharapkan. Pengawasan semacam ini dilakukan dengan cara kombinasi langsung dan tidak langsung oleh manajer.

2.2 Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan adalah sosialisasi tentang perlunya disiplin, mematuhi segala peraturan demi keselamatan kerja bersama. Sosialisasi perlu dilakukan terus menerus, karna usaha pencegahan sangat penting mendapatkan perhatian. Fungsi pengawasan pada prinsipnya sejalan dengan langkah-langkahnya yang meliputi empat unsur yaitu (Hasnun Jauhari Ritongan 2015:79)

1. Penempatan standar pelaksanaan
2. Penentuan ukuran pelaksanaan
3. Pengukuran pelaksanaan nyata dan membandingkannya dengan standar yang telah ditetapkan.
4. Pengambilan tindakan koreksi yang diperlukan bila pelaksanaan penyimpangan dari standar.

Fungsi pengawasan bila tidak dilakukan akan memungkinkan terjadinya kekeliruan-kekeliruan yang terus berlangsung, sehingga tiba-tiba kesalahan tersebut sudah parah dan sulit untuk diatasi. Oleh karenanya bukan hanya tujuan yang tidak tercapai namun kemungkinan dapat menimbulkan kerugian yang besar bagi organisasi. Fungsi pengawasan adalah mengawasi keseluruhan dari kegiatan-

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan untuk menjamin atau mengusahakan agar semua berhasil sesuai dengan apa yang direncanakan (Hasnun Jauhari,2015).

2.3 Jenis – jenis Pengawasan

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut (Nurrahmi hayani 2014 : 101) yaitu :

- a. Pengawasan fungsional (struktural) fungsi pengawasan ini melekat pada seseorang yang menjabat sebagai pimpinan lembaga.
- b. Pengawasan publik, pengawasan ini dilakukan oleh masyarakat
- c. Pengawasan non fungsional, pengawasan ini biasanya dilakukan oleh badan-badan yang di berikan wewenang untuk melakukan pengawasan seperti DPR,BPK KPK dan lain sebagainya.

Adapun macam – macam pengawasan menurut (Brantas 2009:199) :

- a. *internal control*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan kepada bawahanya. Cakupan pengawasan ini meliputi hal-hal yang cukup luas baik pelaksanaan tugas, prosedur kerja, kedisiplinan karyawan dan lain sebagainya.
- b. *External control*, adalah pengawasan yang dilakukan oleh pihak luar. Misalnya pemeriksaan pembukuan oleh kantor akuntan dan penilaian yang dilakukan oleh masyarakat.
- c. *Formal contol*, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat resmi dan dapat dilakukan secara intern maupun ekstern.
- d. *Informal control*, adalah penilaian yang dilakukan oelh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.4 Sifat dan Waktu Pengawasan

Sifat dan waktu pengawasan dibedakan atas : 1). Preventive control; 2). Repressive control; 3). Pengawasan Saat Proses dilakukan ; 4). Pengawasan Berskala ; 5). Pengawasan mendadak; 6). Pengawasan melekat (Brantas 2009:197).

1. *Preventive control*, adalah pengawasan yang dilakukan sebelum kegiatan dilakukan untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya. *Preventive control* ini dilakukan dengan cara .

- Menentukan proses pelaksanaan pekerjaan
- Membuat peraturan dan pedoman pelaksanaan pekerjaan itu.
- Menjelaskan dan mendemonstrasikan cara pelaksanaan itu.
- Mengorganisasi segala macam kegiatan.
- Menentukan jabatan , job description, authority, dan responsibility bagi setiap individu karyawan.
- Menetapkan sanksi-sanksi yang membuat kesalahan.

Preventive control ini adalah pengawasan yang terbaik karna dilakukan sebelum terjadi kesalahan.

2. *Repressive control*, adalah pengawasan yang dilakukan setelah terjadi kesalahan dalam pelaksanaannya, dengan maksud agar tidak terjadi pengulangan kesalahan, sehingga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.

Repressive control dilakukan dengan cara :

- Membandingkan antara hasil dengan rencana.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Menganalisis sebab-sebab yang menimbulkan kesalahan dan mencari tindakan perbaikannya.
- d. Memberikan penilaian terhadap pelaksanaannya; jika perlu dikenakan sanksi hukuman kepadanya.
- e. Menilai kembali prosedur-prosedur pelaksanaan yang ada.
- f. Mengecek kebenaran laporan yang dibuat oleh petugas pelaksana.
- g. Jika perlu meningkatkan keterampilan atau kemampuan pelaksana melalui training atau education.

3. Pengawasan saat proses dilakukan, jika terjadi kesalahan segera diperbaiki
4. Pengawasan berkala, adalah pengawasan yang dilakukan secara berkala, misalnya per bulan, per semester, dan lain-lain.
5. Pengawasan mendadak (sidak), adalah pengawasan yang dilakukan secara mendadak untuk mengetahui apa pelaksanaan atau peraturan-peraturan yang dilaksanakan atau tidak dilaksanakan dengan baik. Pengawasan mendadak ini sekali-kali perlu dilakukan, supaya kedisiplinan tetap terjaga.
6. Pengamatan melekat (waskat) adalah pengawasan yang dilakukan secara integratif mulai dari sebelum, pada saat, dan sesudah kegiatan dilakukan.

2.5 Tujuan Dan Manfaat Pengawasan

Tujuan utama dari pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan. Oleh karna itu, agar sistem pengawasan itu benar-benar efektif artinya dapat merealisasi tujuannya, maka suatu sistem

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan setidak-tidaknya harus dapat dengan segera melaporkan adanya penyimpangan-penyimpangan dari rencana (Manullang 2012: 174).

Untuk dapat benar-benar merealisasikan tujuan utama tersebut, maka pengawasan pada taraf pertama bertujuan agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan instruksi yang telah dikeluarkan dan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan rencana berdasarkan penemuan-penemuan tersebut dapat diambil tindakan untuk memperbaikinya.

Tujuan dari adanya pengawasan adalah (Brantas , 2009: 190).

- a. supaya proses pelaksanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dari rencana.
- b. melakukan tindakan perbaikan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan.
- c. untuk mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan, penyelewengan pemborosan , hambatan dan ketidak adilan.

Menurut Ranupandojo, tujuan dari pengawasan adalah mengusahakan agar pekerjaan-pekerjaan terlaksana sesuai dengan rencana yang ditetapkan atau hasil yang dikehendaki. Sedangkan menurut (Soekarno dalam Gouzali Sayadam) tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah suatu kegiatan sudah berjalan sesuai dengan rencana, sesuai instruksi dan apakah kegiatan telah erjalan efesien. Tujuan utama dari pengawasan ialah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manfaat pengawasan adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan keterbukaan. Pengawasan pada dasarnya menekankan langkah-langkah pembenahan atau koreksi yang objektif jika terjadi perbedaan atau penyimpangan antara pelaksanaan dan perencanaanya.

Ada beberapa manfaat pengawasan diantaranya adalah (Nurahmi hayani 2014 : 100) :

- a. dapat mengetahui progam sejauh mana sudah dilakukan oleh staf, apakah sesuai dngan standar atau rencana kerja, apakah sumbernya telah digunakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.
- b. Dapat mengetahui adanya penyimpangan pada pemahaman staf dalam melaksanakan tugas-tugasnya
- c. Dapat mengetahui sebab-sebab terjadinya penyimpangan
- d. Dapat mengetahui apakah waktu dan sumber daya lainnya mencukupi kebutuhan dan telah dimanfaatkan secara efisien
- e. Dapat mengetahui staf yang perlu diberikan penghargaan, dipromosikan atau diberikan pelatihan lanjutan.

2.6 Prinsip- Prinsip Pengawasan

Pengawasan memiliki beberapa prinsip antara lain (Nurrahmi Hayani 2014 :100)

1. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan harus dimengerti oleh staf dan hasilnya mudah diukur. Misalnya tentang waktu dan tugas-tugas pokok yang harus di selesaikan oleh staf.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. fungsi pengawasan harus difahami pimpinan sebagai suatu kegiatan yang sangat penting dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
3. Standar untuk kerja harus dijelaskan kepada seluruh staf karena kinerja staf akan terus dinilai oleh pimpinan sebagai pertimbangan untuk memberikan reward kepada mereka yang dianggap mampu bekerja.

2.7 Ciri-ciri Pengawasan yang efektif

Pengawasan akan berlangsung dengan efektif apabila memiliki ciri-ciri sebagai berikut (Sondang Siagian 2007 : 130)

1. Pengawasan harus merefleksikan sifat dari berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Maksudnya adalah teknik pengawasan harus sesuai, antara lain dengan penemuan informasi tentang siapa yang melakukan pengawasan dan kegiatan apa yang menjadi sasaran pengawasan tersebut.
2. Pengawasan harus segera memberikan petunjuk tentang kemungkinan adanya deviasi dari rencana. Maksudnya pengawasan harus mampu mendeteksi deviasi atau penyimpangan yang mungkin terjadi sebelum penyimpangan itu menjadi kenyataan.
3. Pengawasan harus menunjukkan pengecualian pada titik-titik strategis tertentu. Maksudnya adalah seorang manajer harus mampu menentukan kegiatan apa yang perlu dilakukannya sendiri dan kegiatan apa pula yang sebaiknya didelegasikan kepada orang lain.
4. Objektivitas dalam melakukan pengawasan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun sejumlah faktor yang dapat mendukung bagi keberhasilan pengawasan antara lain mencakup (Tjuju yuniarsih 2013 :93)

- a. Penetapan standar yang eligible
- b. Pendelgasian diberikan kepada orang yang tepat
- c. Keseimbangan dalam manajemen strategic bisnis
- d. Komunikasi yang efektif
- e. Disiplin proporsionalitas dan profesionalitas
- f. Sinrgi antara pemimpin dan bawahan
- g. Prktik dan perlu kepemimpinan yang transparan dengan mensinergikan IQ, EQ dan SQ.

2.8. Pengertian Satwa yang dilindungi

Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan/atau di air dan/atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun dipelihara oleh manusia. Satwa liar sendiri dapat dibedakan menjadi satwa liar yang tidak dilindungi dan satwa liar yang dilindungi. perlindungan terhadap jenis satwa liar tertentu dimaksudkan untuk mencegah kepunahan terhadap jenis tersebut. hal ini menjadi salah satu upaya pengendalian peredaran yang telah dilakukan Pemeintah yakni dengan membentuk suatu payung hukum yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya berikut peraturan pelaksanaanya seperti Peraturan Pemerintah Nmor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Liar serta Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara. Sedangkan Satwa Liar adalah semua binatang yang hidup di darat, dan atau di air, dan atau di udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia. (daftar nama satwa liar yang dilindungi tersedia di lampiran)

Dalam lampiran Peraturan Pemerintah No.7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis tumbuhan dan Satwa, secara umum di Indonesia dikenal ada 236 nama Satwa yang dilindungi yang terdiri dari jenis mamalia sejumlah 70, Aves 70 jenis, reptilia 30 jenis, insecta 18 jenis, pisces 7 jenis, anthozoa 1, dan bivalvia 13 jenis.

Satwa liar berpengaruh terhadap tanah dan vegetasi dan memegang peran kunci dalam penyebaran, pertumbuhan tanaman, penyerbukan dan pematangan biji, penyuburan tanah, penguraian organisme mati menjadi zat organik yang lebih berguna bagi kehidupan tumbuhan, penyerbukan dan pengubah tumbuh-tumbuhan dan tanah.

2.9 Pengertian Konservasi

Konservasi adalah segenap proses pengelolaan suatu tempat agar makna kultural yang dikandungnya terpelihara dengan baik (Piagam Burra,1998).

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun dalam pengertian lainnya konservasi adalah pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan (Peter Salim dan Yenny Salim, 1991).

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa lembaga Konservasi adalah lembaga yang bergerak dibidang konservasi tumbuhan dan atau satwa diluar habitatnya (ex situ), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga nonpemerintah. Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa diluar habitatnya (ex situ) dilakukan dengan melakukan kegiatan seperti pemeliharaan satwa, pengembangbiakan satwa, pengkajian, penelitian dan pengembangan satwa, rehabilitas satwa, dan juga penyelamatan jenis satwa. Konservasi sebagai penggunaan sumber daya alam untuk kebaikan secara optimal, dalam jumlah yang terbanyak dan untuk jangka waktu yang paling lama. Kelebihan dari konservasi ex situ adalah dapat mencegah terjadinya gangguan, sehingga keselamatan spesies lebih terjamin.

Konservasi diartikan sebagai pengembangan dan proteksi terhadap sumberdaya alam (gifford pinchot). Konservasi adalah sutau tindakan untuk mencegah pengurusan sumber daya alam dengan cara pengambilan yang tidak berlebihan sehingga dalam jangka panjang sumber daya alam tetap tersedia (Provesor Wantrup). Konservasi juga dapat diartikan menjaga kelestarian terhadap alam demi kelangsungan hidup manusia. tindakan-tindakan konservasi dapat berupa beberapa cara antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Melakukan perencanaan terhadap pengambilan sumberdaya alam, yaitu dengan pengambilan secara terbatas, dan tindakan yang mengarah pada pengurusan perlu dicegah.
- b. Mengusahakan eksplotasi sumberdaya alam secara efisien yakni dengan limbah sedikit mungkin.
- c. Mengurangi, membatasi dan mengatasi pencemaran lingkungan karena pencemaran akan mengakibatkan cadangan sumberdaya alam semakin cepat habis karena kepunahan, seperti ikan, tanah dan sebagainya

Salah satu cara untuk mengkonservasi sumber daya hayati adalah mengalokasikan kawasan tertentu sebagai kawasan yang dilindungi. Di Indonesia ini konservasi sumberdaya hayati secara in situ dilakukan di kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, yang merupakan bagian dari kawasan hutan konservasi. Pengelolaan kedua kawasan itu diatur dalam UU no 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Hayati dan Ekosistemnya dan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1998 Tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan pelestarian Alam. Dalam Pasal 1 UU no 5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah No 68 Tahun 1998 disebutkan : Kawasan Suaka Alam (KSA) adalah kawasan dengan ciri khusus tertentu baik daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan pelestarian alam (KPA) adalah kawasan dengan ciri khusus tertentu baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan suaka alam merupakan bagian bagian dari hutan konservasi. Pengertian hutan konservasi menurut Undang-undang No 41 Tahun 1999 tentang kehutanan adalah : kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya.

2.9.1 Fungsi dan Tujuan Lembaga Konservasi

Menurut peraturan pemerintah republik indonesia nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa pasal 22 lembaga konservasi mempunyai fungsi utama yaitu pengembangbiakan dan atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya. Disamping mempunyai fungsi utama lembaga konservasi juga berfungsi sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Lembaga konservasi dapat berbentuk kebun binatang, museum zoologi, taman satwa khusus, pusat latihan satwa khusus, kebun botani, herbarium dan taman tumbuhan khusus.

Konservasi di Indonesia ini mempunyai tujuan diantaranya adalah, memelihara proses ekologi yang penting dan sistem penyangga kehidupan, menjamin keanekaragaman genetik, pelestarian pemanfaatan jenis dan ekosistem. Sedangkan tujuan konservasi tumbuhan dan satwa menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Tumbuhan Dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Satwa adalah untuk menghindarkan jenis tumbuhan dan satwa dari bahaya kepunahan, menjaga kemurnian genetik dan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, dan memelihara keseimbangan dan kemantapan ekosistem yang ada agar dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan manusia secara berkelanjutan. Dan upaya yang dilakukan oleh lembaga konservasi tersebut meliputi penetapan dan penggolongan yang dilindungi dan tidak dilindungi, pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa serta habitatnya, dan upaya yang terakhir adalah pemeliharaan dan pengembangbiakan.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dilakukan melalui kegiatan perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya, dan juga pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Konservasi juga mempunyai peranan dalam pembangunan diantaranya adalah sebagai penyelamat usaha pembangunan dan hasil-hasil pembangunan, sebagai pengembang ilmu pendidikan, sebagai pengembangan kepariwisataan dan peningkatan devisa sebagai pendukung pembangunan bidang pertanian, dan sebagainya manfaat bagi manusia.

2.10 Pandangan Islam Mengenai Satwa

Sumber daya alam adalah segala bentuk kandungan alam, sebagai nikmat dan karunia Allah swt yang bisa dieksploitasi dan diolah manusia untuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendukung kelangsungan hidupnya dan keperluan makhluk-makhluk lain. Sumber daya alam tersebut adalah sumber daya mineral, sumber daya laut, sumber daya hutan beserta makhluk dan tumbuhan yang ada didalamnya. Alquran tidak pernah menginformasikan segala sesuatu dalam ini hanya sebagai unsur lingkungan semata, melainkan seluruhnya merupakan sumber daya yang memberi manfaat bagi manusia dan makhluk lain.

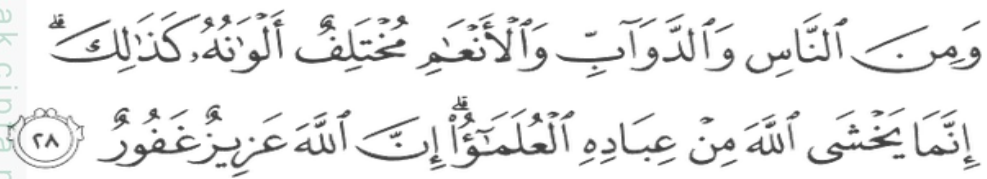
وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ
وَلَا تَبْغِ الْفُسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ

Artinya : Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. (QS.Al-Qashash 28, ayat 77)

Pada ayat tersebut, terdapat larangan bagi setiap manusia agar mereka tidak membuat kerusakan, tidak semena-mena memperlakukan manusia lain, makhluk lain, dan juga lingkungan sehingga semua menjadi rusak dan meninggalkan warisan yang sia-sia bagi penerus kita. Allah menitipkan pada kita agar kita dapat memelihara alam dan kehidupan ini supaya tetap menjadi kebaikan bagi umat penerus kita kelak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Artinya : Dan demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama). Sungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. (QS. Faathir, 35 : 28).

2.11 Penelitian Terdahulu

Adapun beberapa karya yang dapat penulis pakai sebagai rujukan untuk mendukung dalam penulisan skripsi yang penulis angkat , antara lain :

1. Tri Rahayu (2015) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yang Melakukan Penelitian Dengan Judul Perlindungan Hukum Terhadap Satwa Dari Perdagangan Liar (Studi Pada Wildlife Rescue Centre, Pengasih Kulon Progo Yogyakarta) hasilnya adalah Perlindungan terhadap satwa dari perdagangan liar di Wildlife Rescue Centre sebagai proyek dari Lembaga Konservasi Yayasan Konservasi Alam Yogyakarta dibuktikan dengan Wildlife Rescue Centre yang menerapkan lima pokok kesejahteraan bagi satwa dalam perawatan satwa
2. Inka Ayu Arianti (2011) Universitas Airlangga, yang melakukan penelitian dengan judul pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana terkait satwa yang dilindungi. Hasilnya adalah Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku yang terkait tindak pidana satwa langka, dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diklasifikasikan menjadi : pemilik, pedagang, eksportir (individu), importir (individu) yang menyimpan, memiliki, memelihara, ikut menegosiasikan harga penjualan, dan memberikan dan menyediakan rumah sebagai tempat penyimpanan terhadap satwa yang dilindungi.

3. Arif Budiman (2014) Universitas Sebelas Maret Surakarta, yang melakukan penelitian dengan judul Implementasi Perlindungan Satwa Langka Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Hasilnya adalah strategi dan manajemen SKW I Surakarta BKSDA bersifat wait to see artinya melakukan monitoring perkembangan masyarakat.
4. Yuliannova Lestari (2016) Universitas Kuala Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Yang, melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Terhadap Perlindungan Harimau Sumatra. Hasilnya adalah belum terlaksana dengan baik, oknum pejabat yang terlibat serta kesadaran masyarakat yang masih lemah.
5. Insari Akbar (2014) Universitas Kuala Syiah Kuala Darussalam Banda Aceh. Yang, melakukan penelitian dengan judul Pelaksanaan Tugas dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam dalam Perlindungan Satwa Liar yang Dilindungi di Provinsi Aceh. Hasilnya adalah pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BKSDA belum berjalan dengan baik karna masih ada banyak hambatan yang dihadapi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2.12 Definisi Konsep

Konsep-konsep yang telah dikemukakan di atas masih bersifat abstrak, maka agar tercapai kesatuan pengetahuan dan untuk memudahkan penelitian, maka dimasukkan beberapa batasan yang berpedoman pada teori yang dikemukakan pada telaah pustaka. Definisi konsep merupakan batasan dalam penelitian yang merupakan pokok batasan pada bagian berikutnya, dimaksudkan agar memberikan arah dalam penulisan bagian berikutnya, yaitu dengan mendefinisikan sebagai berikut:

1. Pengawasan: Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Yang dimaksud dengan pengawasan di penelitian ini adalah pengawasan B2KSDA terhadap perdagangan satwa liar di kota Pekanbaru.
2. Konservasi : Pemeliharaan dan perlindungan terhadap sesuatu yang dilakukan secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan cara pengawetan.
3. Satwa yang dilindungi : satwa-satwa yang keberadaannya banyak tidak ditemui lagi, atau satwa-satwa yang dilindungi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa. Yang termasuk satwa liar yang menjadi objek penelitian ini adalah kukang, orang utan, kucing hutan, siamang, owa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.13 Konsep Operasional

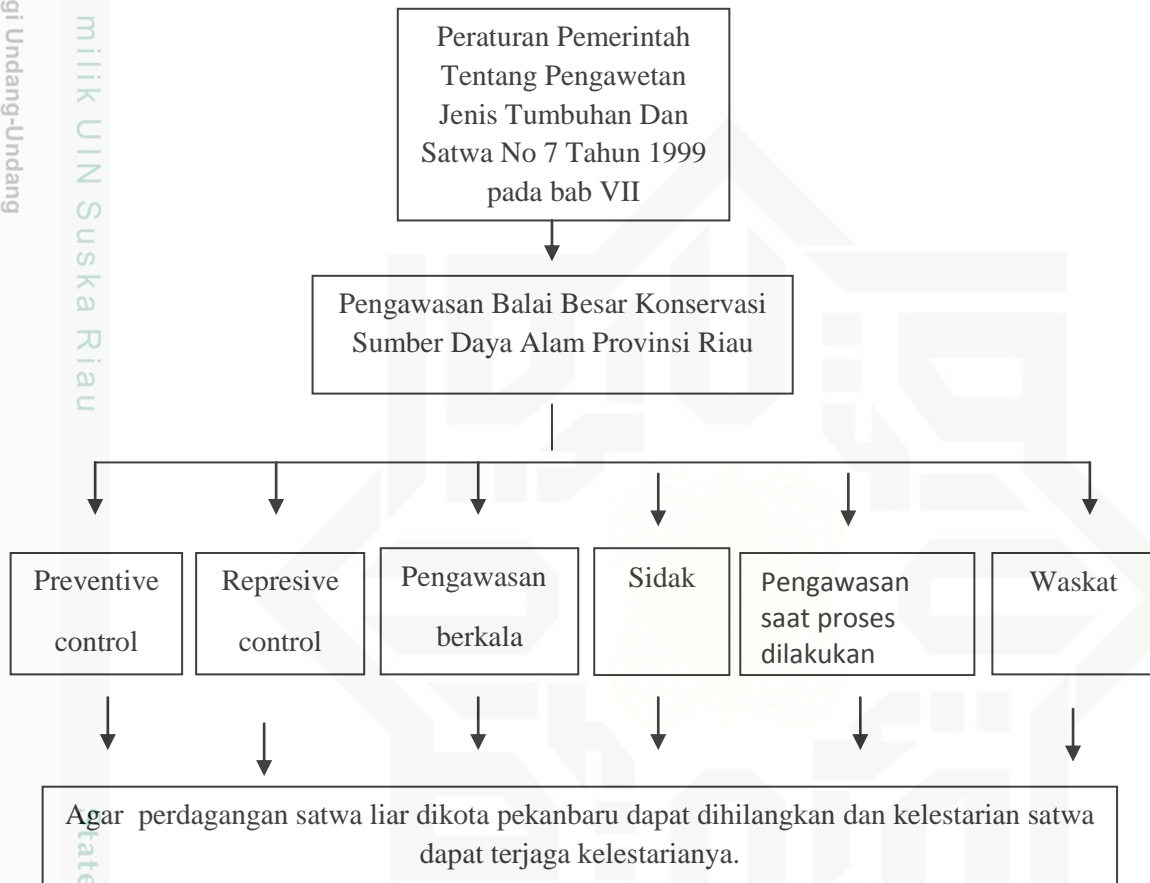
Tabel 2.1 Konsep Operasional.

Referensi	indikator	Sub indikator
Pengawasan Perdagangan Satwa Liar Oleh Balai Besar Konservasi Sumber daya Alam Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru	1 Preventif Control	1 Sosialisasi/ Penyuluhan 2 penerbitan buku buku tentang satwa yang dilindungi
	2 Represiv Control	1 Teguran/Peringatan 2 Pemberian Sanksi 3 pemberian denda
	3 Pengawasan berkala	1 konsistensi pengawasan 2 Jangka Waktu
	4 pengawasan saat proses dilakukan	1 Transparansi 2 Pengawasan Masyarakat
	5 pengawasan mendadak (sidak)	1 Razia Perdagangan Satwa 2 Melakukan Penyitaan
	6 pengawasan melekat (waskat)	1 Monitoring Pihak Pengawas 2 Evaluasi

Sumber (Brantas 2009)

2.14 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 : Kerangka Berfikir



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.